



**KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS**

**RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN
(RTP)
STRATEGIS
TAHUN 2025**



KECAMATAN SUMBANG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Kecamatan Sumbang.

Tujuan Kecamatan Sumbang dalam Renstra Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas . Agar tujuan tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah

C. TUJUAN

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kecamatan Sumbang dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah keterjadian risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026.

D. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas;
2. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
3. Mengenali risiko yang menghambat pencapaian Tujuan Kecamatan Sumbang tahun 2024-2026 dan merencanakan tindak pengendalian atas risiko yang tepat.

E. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis Pemerintah Kecamatan Sumbang yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026

Dokumen RTP Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 (periode penilaian tahun 2025) disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;
3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran strategis yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika ;
2. Komitmen terhadap kompetensi ;
3. Kepemimpinan yang kondusif ;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif ;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing. Kegiatan untuk mengendalikan risiki dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem oengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penialaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri /Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/ tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika ;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Sumbang diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Sumbang
Tahun 2025**

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber : Aplikasi MRI, 2025

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi seluruh ASN Kecamatan Sumbang menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 (periode penilaian tahun 2025) dalam kondisi baik/ memadai. Terdapat beberapa Sub Unsur yang dalam kondisi kurang memadai seperti :

1. Komitmen Terhadap Kompetensi

Pada subunsur ini, dokumen LKJIP belum menginfokan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta belumseluruhnya dipublikasikan tepat waktu.

2. Kepemimpinan Yang Kondusif

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP.

3. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat

Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko strategis Kecamatan Sumbang. Renstra Kecamatan Sumbang transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kecamatan Sumbang tahun 2024-2026.

Kecamatan Sumbang Tahun 2024-2026 memiliki 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun. Dimana tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan; 2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan.

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahap selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat SK Camat Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas
2. Membuat SK Camat tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kecamatan Sumbang
3. Menyusun SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sumbang (Renstra, Renja, Pokin, RKA);
4. Menyusun SK Pengelolaan Risiko Kecamatan Sumbang;
5. Memperbaiki SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja;
6. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Sumbang Tahun 2025

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat.

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektifitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII

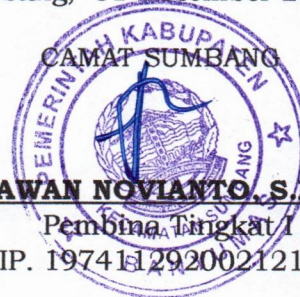
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun.

Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sumbang, 31 Desember 2024



HERMAWAN NOVIANTO, S.H, M.H
Pembina, Tingkat I
NIP. 197411292002121001

Hasil Rekap Skala

F-1A

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)										KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	Modus	
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA										Memadai	
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI										Memadai	
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF										Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

2	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
6	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
8	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN											Memadai
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	1	1	3	3	4	3	3	Memadai

E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT											Memadai
1	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	1	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA											Memadai
1	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	4	3	3	4	1	3	Memadai
4	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	Memadai
5	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	Memadai
6	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
7	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF											Memadai
1	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

2	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT											Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai

Data Koresponden

No Keterangan

- Camat Kecamatan Sumbang [197411292002121001-hermawan Novianto,sh,
R1 Mh.] Hapus
R2 Sekretaris Kecamatan [197111121998031011-abdul Ladjis,s.st] Hapus
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan [198412242009031002-david
R3 Prabowo, Se] Hapus
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [196905092007012007-ernie
R4 Lindawati] Hapus
R5 Pengelola Barang Milik Negara [197607302009011007-suwaryo] Hapus
R6 Pengadministrasi Umum [196703272008011013-ratno] Hapus
Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban [198610062011011006-koko
R7 Andriyanto,a.md.kom] Hapus

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat [196903241989031005-

R8 suratno,s.sos] Hapus

Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan [197008061992122001-susana

R9 Agustriani] Hapus

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

F-1B

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.	Telah mencantumkan informasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra; memperbaiki SOP penyusunan dokumen perencanaan kinerja melalui rapat internal.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.	Kecamatan Sumbang telah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dengan tepat waktu.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.	Indikator kinerja dan formulasi perhitungan pada Perjanjian Kinerja (PK) pada Kec. Sumbang, sudah sesuai dengan arahan, format, dan kebijakan dari bagian organisasi Kabupaten Banyumas. Sehingga tidak perlu adanya koreksi atau perubahan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan didalam Perjanjian Kinerja tersebut.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
4	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.	Telah menginfokan capaian kinerja atas upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKjIP tahun 2023	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
5	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi Kinerja internal telah didukung dengan SOP dan telah dilaksanakan secara berkala.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

F-1C

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	- Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. - Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.	Memadai		Kurang Memadai	- Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 belum menginfokan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. - Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya dipublikasikan tepat waktu.
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP - Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.	Memadai		Kurang Memadai	- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP - Pada pengukuran kinerja terdapat indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen perencanaan (Renstra & SOP) belum disusun sesuai standar yang baik.
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

FORM - 2

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: KEC. SUMBANG	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan : 85.95 Nilai
	2	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %
Informasi Lain	-	
	<u>1</u> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
	<u>1.1</u> Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	<u>1.1.1</u> Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	
	<u>1.1.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	<u>1.2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	<u>1.2.1</u> Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	
	<u>1.2.70105</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	<u>1.2.70102</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan
penilaian risiko

1.2.70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.2.70106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1.2.70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Purwokerto, 23 Januari 2025

KEPALA KEC. SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS

HERMAWAN NOVIANTO,SH, MH.

Pembina Tingkat I

19741129 200212 1 001

Identifikasi RSO Strategi OPD

FORM - 3

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD																								
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena																									
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik		7,01E+12	1. Cascading dalam perencanaan belum mengacu pada pohon kinerja; 2. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria Smart-C dan belum jelas definisi operasionalnya; 3. SOP penyusunan dokumen kinerja yang ditetapkan belum memadai; 4. Pengelolaan Risiko pada penetapan tujuan dokren (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) belum disusun dengan baik; 5. Pemahaman SDM Penyusun Perencanaan masih kurang; 6. Evaluasi kinerja belum memberikan dampak dan perbaikan pada perencanaan dan pengukuran kinerja berikutnya	Internal	C	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan 3. Tujuan kinerja Kecamatan tidak tercapai/ hasil pembangunan atas perencanaan yang disusun tidak optimal	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG																								
															2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		7,01E+12	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat 5. kurangnya transparansi. Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPATK	Internal	C	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG											
		Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	7,01E+12	1. rendahnya kualitas SDM pelayanan kecamatan dalam penggunaan teknologi; 2. kualitas sarana prasarana pelayanan kurang mendukung; 3. adanya beban kerja pelayanan diluar tuisi/kewenangan; 4. pemberian pelayanan tidak sesuai SOP layanan yang telah ditetapkan; 5. Belum adanya kebijakan/ SK terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi layanan pada kecamatan sumbang	Internal	C	1. kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang	Camat & Masyarakat	KEC. SUMBANG																													
										Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	7,01E+12	Bertambahnya bahan kerja pelayanan diluar tuisi / kewenangan	Internal	C														Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pembab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG								
																															Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	7,01E+12	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pebangunan di wilayah kecamatan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah kecamatan	Pembkab Kecamatan dan Masyarakat	KEC. SUMBANG

Rekap Skala Risiko

FORM - 4

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik	RSO.25		50	50	2.1	1.8	3.78
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25		50	50	1.8	1.7	3.06
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.25		50	50	2.0	2.0	4
4	Tidak terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat	RSO.25		50	50	1.9	1.4	2.66

Rekap Skala Risiko

FORM - 5

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik	RSO.25	50	50	3.78	KEC. SUMBANG	1. Cascading dalam perencanaan belum mengacu pada pohon kinerja; 2. Indikator kinerja belum memenuhi kriteria Smart-C dan belum jelas definisi operasionalnya; 3. SOP penyusunan dokumen kinerja yang ditetapkan belum memadai; 4. Pengelolaan Risiko pada penetapan tujuan dokren (tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan) belum disusun dengan baik; 5. Pemahaman SDM Penyusun Perencanaan masih kurang; 6. Evaluasi kinerja belum memberikan dampak dan perbaikan pada perencanaan dan pengukuran kinerja berikutnya	1. Kinerja pemerintah kecamatan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel tidak terwujud; 2. Masyarakat kurang puas dengan kinerja dan pelayanan kecamatan 3. Tujuan kinerja Kecamatan tidak tercapai/ hasil pembangunan atas perencanaan yang disusun tidak optimal
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25	50	50	3.06	KEC. SUMBANG	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat 5. kurangnya transparansi.	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sumbang tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	RSO.25	50	50	4	KEC. SUMBANG	1. rendahnya kualitas SDM pelayanan kecamatan dalam penggunaan teknologi; 2. kualitas sarana prasarana pelayanan kurang mendukung; 3. adanya beban kerja pelayanan diluar tuisi/kewenangan; 4. pemberian pelayanan tidak sesuai SOP layanan yang telah ditetapkan; 5. Belum adanya kebijakan/ SK terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi layanan pada kecamatan sumbang	1. kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan; 3. ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan
4	Tidak terlaksananya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat	RSO.25	50	50	2.66	KEC. SUMBANG	1. pelaksanaan musrenbang yang partisipatif belum maksimal dilaksanakan; 2. fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di kecamatan masih kurang; 3. pengalokasian anggaran belum sesuai dengan prioritas pembangunan yang dibutuhkan di wilayah kecamatan	1. Pembangunan di wilayah kecamatan tidak tepat sasaran/efisien dan efektif (mengeluarkan banyak anggaran tanpa adanya hasil kinerja); 2. Ketidakpuasan masyarakat di wilayah kecamatan terhadap pembangunan kecamatan/ pembangunan di wilayah kecamatan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar;

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

FORM - 6

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	Kebijakan & prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Camat	2025
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	Kebijakan & prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Camat	2025
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	E	Kebijakan & prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Camat	2025
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	Kebijakan & prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Camat	2025
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Sumbang Tahun 2024 No. 700/092.PKPT/164/IRBAN.I/ST.065/2024	KE	Kebijakan & prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Camat	2025

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Form - 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Perencanaan kinerja belum memenuhi kualitas standar yang baik		1. SOP Pengukuran Kinerja Nomor SOP.PK.05/1/2023; 2. SOP Nomor SOP.PK.04/1/2024 tentang Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA); 3. SOP Nomor SOP.PK.03/1/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); 3. SOP Nomor SOP.PK.01/1/2024 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), dan SOP Nomor SOP.PK.02/1/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja); 2. Dokumen perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja (Renstra 2024-2026, Renja 2024, Renja 2025, LKIP 2023)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Menyusun SK Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan penganggaran Kecamatan Sumbang (Renstra, Renja, Pokin, RKA); 2. Menyusun SK Pengelolaan Risiko Kecamatan Sumbang; 3. Memperbaiki SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja; 4. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Sumbang Tahun 2025	Camat	2025
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		Pakta Integritas ASN Kecamatan sumbang	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	1. Penyusunan kebijakan (SK atau SE) atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sumbang; 2. Menyusun SK Camat Tentang Pemberian reward dan punishment bagi pegawai di lingkungan kantor Kecamatan Sumbang.	Camat	2025
3	Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya		Surat Keputusan (SK) Camat Sumbang Nomor 009 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kecamatan Sumbang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Membuat SK Camat Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 2. Membuat SK Camat tentang penunjukkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kecamatan Sumbang	Camat	2025

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
KECAMATAN SUMBANG

FORM - 8 SASARAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Membuat perjanjian kinerja dan SOP dalam melaksanakan kinerja	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
2	Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan berkala, Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		
3	Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efesien	Rapat Koordinasi, Konsultasi, Rencana Inovasi Pelayanan	Camat	Kecamatan Sumbang dan Masyarakat	2025		

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN
KECAMATAN SUMBANG

FORM - 8 RTP PI

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
2	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
3	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat Internal, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
4	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		
5	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Laporan berupa data atau dokumen, Rapat, Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Kecamatan Sumbang	2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
KECAMATAN SUMBANG

FORM - 9 SASARAN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Membuat perjanjian kinerja dan SOP dalam melaksanakan kinerja	Rapat Koordinasi dan Evaluasi berkala	Camat	2025		
2	Melaksanakan sosialisasi Pungli kepada masyarakat terkait peraturan yang berlaku agar masyarakat teredukasi	Sosialisasi an Evaluasi Berkala	Camat	2025		
3	Menyusun Inovasi Pelayanan yang efektif dan Efesien	SOP Kecamatan Sumbang	Camat	2025		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
KECAMATAN SUMBANG

FORM - 9 RTP PI

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Sumbang dipublikasikan pada website Kecamatan dan website E-Sakip atau Esr.Menpan pada tepat waktu	Dokumen dan Website	Camat	2025		
2	Mencantumkan upaya dan hambatan dalam mencapai target dan rencana pada dokumen LKJIP ditahun berikutnya.	Laporan LKJIP, Laporan RPD, Laporan Monev	Camat	2025		
3	Melakukan Evaluasi Kinerja internal secara berkala dan mendalam, serta hasilnya dioptimalkan sebagai bahan perbaikan untuk program kinerja selanjutnya.	Laporan Monev, Laporan Kinerja, Rapat dan Koordinasi	Camat	2025		
4	Mencantumkan Indikator Kinerja dan Formulasi Perhitungan mengikuti kebijakan dan format yang diarahkan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas	Dokumen PK dan Koordinasi	Camat	2025		
5	Mencantumkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang didukung oleh OPD serta dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan melalui rapat internal	Laporan Dokumen Perencanaan Kinerja, Rapat & Koordinasi	Camat	2025		